



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)

# 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) 2021  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya





## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>III</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
A. LATAR BELAKANG .....	5
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>13</b>
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 .....	13
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021 .....	14
C. PERJANJIAN KINERJA 2021 .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>17</b>
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	17
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>45</b>
A. KESIMPULAN .....	45
B. SARAN .....	45
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>46</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal.
1	Sasaran strategis	14
2	Rencana Kinerja Tahun 2021	15
3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
4	Keadaan Perkara sebagai Tingkat Banding	18
5	Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi Tahun 2021	19
6	Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Mengajukan PK Tahun 2021	19
7	Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu sebagai Tingkat Banding	20
8	Sasaran Strategis 1	21
8.1	Sisa Perkara Tahun 2020 yang Diselesaikan di Tahun 2021	22
8.2	Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan di Tahun 2021	22
8.3	Capaian Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan di Tahun 2019 s/d 2021	23
8.4	Capaian Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	29
8.5	Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara di Tahun 2019 s/d 2021	31
8.6	Rekapitulasi Perkara yang Mengajukan Kasasi Tahun 2021	31
8.7	Rekapitulasi Perkara yang Mengajukan PK Tahun 2021	31
8.8	Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK di Tahun 2019 s/d 2021	32
9	Sasaran Strategis 2	33
9.1	Capaian Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu di Tahun 2019 s/d 2021	34
9.2	Capaian Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Dalam 1 Hari Setelah Perkara Putus di Tahun 2019 s/d 2021	35
10	Sasaran Strategis 3	35
10.1	Capaian Persentase Pembinaan ke Daerah di Tahun 2019 s/d 2021	38
11	Sasaran Strategis 4	38
11.1	Capaian Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Tahun 2019 s/d 2021	39
11.2	Capaian Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Tahun 2019 s/d 2021	42
12	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2018 s/d 2020	43
13	Realisasi Anggaran DIPA 05 Tahun 2019 s/d 2021	44
14	Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal.
1	Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Tepat Waktu pada Aplikasi SIPP	24
2	Bukti Pengiriman Salinan Putusan Secara Digital di Aplikasi SIPP	34
3	Foto Salah Satu Kegiatan Pembinaan di Tahun 2021	37
4	Laporan Tahunan Penanganan Pengaduan	39
5	Foto Salah Satu Kegiatan Pengawasan di Tahun 2021	42



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tahun 2021 ini.

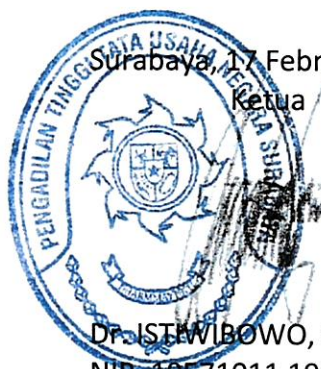
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voorpost) dari Mahkamah Agung RI, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya meliputi daerah hukum Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan amanat yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 14, 27 dan 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, oleh karenanya pengukuran kinerja, evaluasi dan pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja adalah merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh karena dari ketiga hal tersebut akan dapat diperoleh informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing instansi pemerintah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan serta akuntabel di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.



Surabaya, 17 Februari 2022

Ketua

Dr. ISTEWIBOWO, S.H.,M.H.

NIP. 19571011 198503 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Permen PAN dan RB Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
4. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bertujuan untuk melaporkan “Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama tahun 2021 yang dibandingkan dengan “Rencana Kinerja” (Performance Plan) tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada “Rencana Strategis” (Strategic Plan) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 2020 – 2024.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan kualitas SDM.

#### 4. Peningkatan kualitas Pengawasan.

Pencapaian hasil kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam kurun waktu tahun 2021 telah berusaha memenuhi / mencapai 4 (empat) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target, dengan terlebih dahulu merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan pencapaiannya.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah **sebesar 93,63%**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
c. Persentase penurunan sisa perkara	80%	NIHIL	80%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	80%	55,24%	69,05%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			87,26%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%	NIHIL	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			100%





## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa :

**“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”**

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”**

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

**“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”**

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Renstra 5 (lima) tahunan Tahun 2020 – 2024.

Pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2021 dilakukan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun yang akan datang.

## **B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut :

### **1. Kedudukan**

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bila timbul benturan kepentingan, perselisihan/sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan eksekusi;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan, Kepegawaian dan TI, Rencana Program dan Anggaran);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum Tata Usaha Negara, pelayanan riset/penelitian;

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat kekhususan, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disamping sebagai Pengadilan Tingkat Banding juga bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 48.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu,**

maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / administrasi yang tersedia.

**(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.**

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.**

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Pebruari 1993 adalah merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993, meliputi daerah propinsi Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara yang dimintakan Pemeriksaan Banding oleh para pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu dari :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
- Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
- Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
- Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
- Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
- Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan :

- Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai tingkat pertama dan terakhir;
- Sengketa yang telah melalui upaya administrative, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan, Kepegawaian dan TI, Rencana Program dan Anggaran);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum Tata Usaha Negara, pelayanan riset / penelitian.

Di samping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada **Standar Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah dievaluasi pada tanggal 14 Januari 2017 seiring dengan diterimanya **Sertifikasi ISO 9001:2015** oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Mei 2017. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP)

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang **Pelayanan Publik** yang memuat antara lain sebagai berikut :

- Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
- Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
- Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
- Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Tersedianya system pengelolaan organisasi;
- Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Tidak kalah penting dari diterimanya **Sertifikasi ISO 9001:2015**, adalah hasil penilaian oleh Tim Auditor Eksternal (Assesor) yang dilaksanakan sejak tanggal 02 s/d 03 Mei 2019 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2019, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh nilai **"A (Excellent)"**.

Untuk saat ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta seluruh wilayah hukumnya sedang berjuang membangun komitmen bersama untuk mewujudkan **Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

**Kondisi-kondisi** tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi **yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)** yang menjadi salah satu tujuan **Reformasi Birokrasi**.

### 3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan, Hakim Tinggi dan Panitera/Sekretaris.

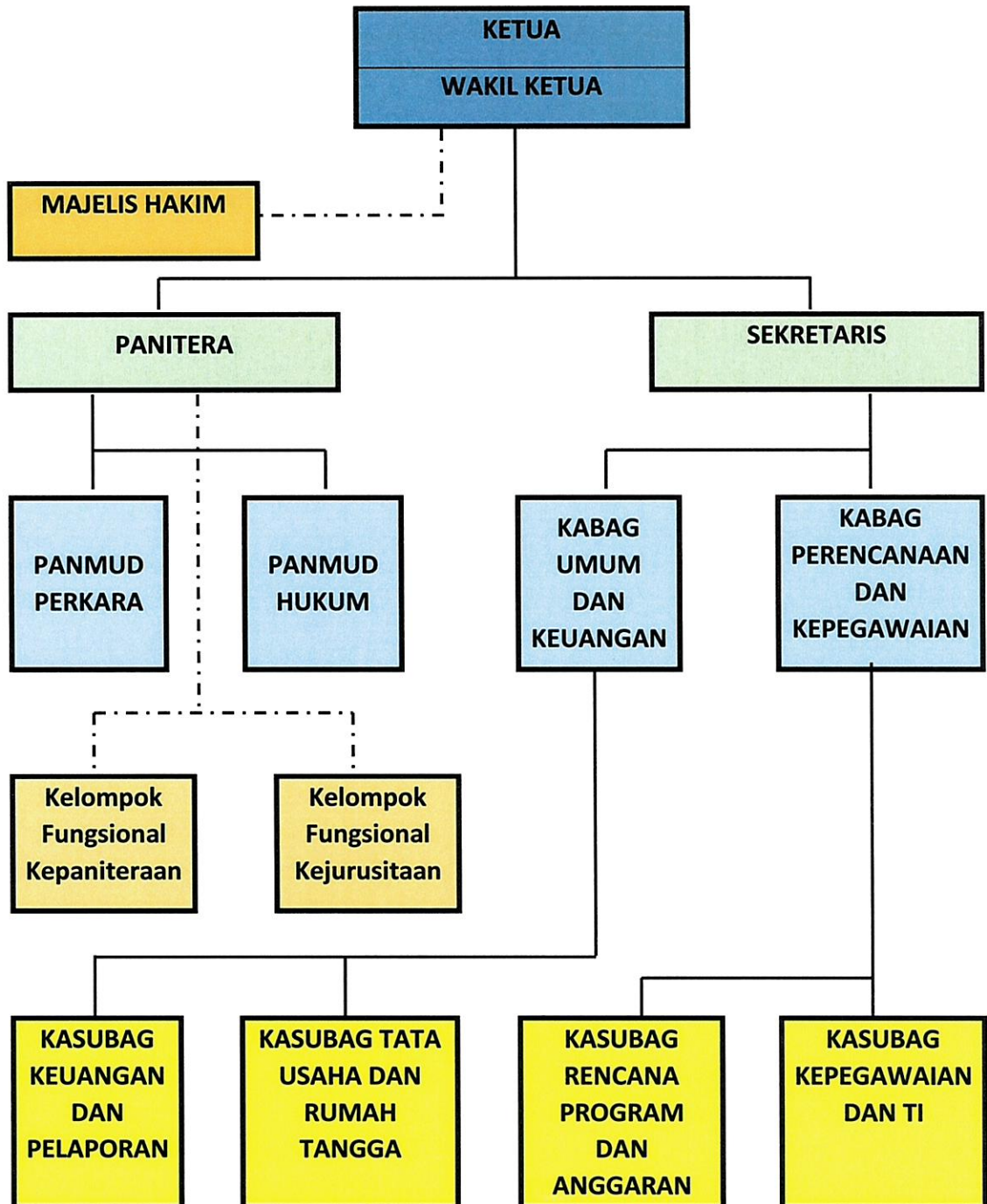
Seiring dengan terjadinya perubahan struktur di Mahkamah Agung RI yang ditandai adanya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung RI, hal itu juga berlaku pada badan peradilan di empat lingkungan peradilan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, adalah sebagai berikut :

- 1) Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
- 2) Hakim Tinggi adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman;
- 3) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya dipimpin oleh seorang Panitera;
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum, disamping itu juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti;
- 5) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- 7) Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;

8) Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tehnologi Informasi;

Adapun struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, seperti tergambar di bawah ini :



Keterangan :

———— = Garis Komando / Perintah (Administrasi/Manajemen Peradilan)

- - - - - = Garis Koordinasi (Tehnis Peradilan)





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

**V i s i** adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun **Visi** dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah :

**“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang agung”**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, menetapkan **M i s i** yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan **tujuan strategis** tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
2. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menetapkan **sasaran strategis**, sebagai berikut :

**Tabel 1**  
Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus
3.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase Pembinaan ke daerah
4.	Peningkatan kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase Pengawasan ke daerah

#### **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2**  
Rencana Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	80%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase Pembinaan ke daerah	100%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase Pengawasan ke daerah	100%

### C. PERJANJIAN KINERJA 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut :

**Tabel 3**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	80%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase Pembinaan ke daerah	100%
4.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase Pengawasan ke daerah	100%



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini.

Untuk memudahkan dalam melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun 2021, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu keadaan perkara dan penyelesaiannya, sebagai berikut :

#### 1. Keadaan Perkara

##### a. Keadaan Perkara sebagai Tingkat Pertama

Penyelenggaraan Pemilu memiliki potensi menimbulkan setidaknya empat macam permasalahan yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, perselisihan administrasi pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dalam hal timbul sengketa administrasi pemilu maka instansi yang berwenang menyelesaikannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan dibatalkannya pasal 236 C Undang-Undang No. 12 Thn. 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 48 Thn. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penanganan sengketa Pilkada cukup dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama nya.

Selama tahun 2021, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa Pilkada, sehingga tidak ada laporan yang dapat disajikan mengenai keadaan perkara tingkat pertama. Hal ini disebabkan tidak ada Pemilukada di tahun 2021 ini.

b. Keadaan Perkara sebagai Tingkat Banding

Pada tahun 2021, perkara banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 252 Perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2020 yang belum diselesaikan sejumlah 11 Perkara, sehingga beban perkara yang harus diselesaikan di tahun 2021 adalah sejumlah 263 Perkara.

Dari keseluruhan perkara di tahun 2021 sejumlah 23 Perkara, telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 248 Perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2021 adalah sejumlah 15 Perkara.

Berikut dapat digambarkan keadaan perkara tingkat banding di tahun 2021 dalam matriks tabel di bawah ini :

**Tabel 4**  
Keadaan Perkara sebagai Tingkat Banding

No	Klasifikasi	Sisa di Th. 2020	Masuk di Th. 2021	Jumlah Beban	Putus di Th. 2021	Cabut	Sisa di Th. 2021
1	Pertanahan	1	115	116	110	-	6
2	Kepegawaian	2	22	24	23	-	1
3	Perijinan	-	1	1	1	-	-
4	Tender	-	6	6	6	-	-
5	Lelang	-	4	4	4	-	-
6	Pajak	-	3	3	3	-	-
7	Lingkungan Hidup	-	1	1	1	-	-
8	Lain Lain	8	100	108	100	-	8
	Jumlah	11	252	263	248	-	15

c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Untuk permohonan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yang diterima di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan untuk diselesaikan di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI di tahun 2021 ini, adalah sebagai berikut :

1) Sebagai Tingkat Pertama

Dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk penyelesaian perkara Pilkada di tahun 2021 tidak ada perkara Pilkada yang masuk dikarenakan tidak adanya Pemilu di tahun 2021, sehingga tidak ada laporan yang dapat disajikan.

2) Sebagai Tingkat Banding

Dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk penyelesaian perkara di wilayah hukumnya, dapat digambarkan dalam matriks berikut ini :

**Tabel 5**

Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	40
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	23
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	2
4.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	5
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	1
6.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	23
	<b>Jumlah Total</b>	<b>94</b>

**Tabel 6**

Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Mengajukan PK Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	11
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	2
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	-
4.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	-
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	1
6.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	3
	<b>Jumlah Total</b>	<b>17</b>

## 2. Penyelesaian Perkara

### a. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Sebagaimana telah diuraikan diatas dari keseluruhan perkara di tahun 2021 sejumlah 263 Perkara, telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 248 Perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2021 adalah sejumlah 15 Perkara.

### b. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Dari keseluruhan perkara yang diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Tahun 2021, telah diselesaikan dan diputus tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tabel 7**

Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu sebagai Tingkat Banding

No	Wil. Pengadilan Tinggi	Rentang Waktu Memutus				Ket
		1-3 Bulan	3-6 Bulan	6-12 Bulan	>12 Bulan	
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	√	--	--	--	Perkara yang diputus sejumlah 248 perkara

### c. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK

Dari keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Tingkat Banding dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut :

- Perkara yang diputus di tingkat banding sejumlah 248 Perkara;
- Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 94 Perkara;
- Perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sejumlah 17 Perkara;
- **Jadi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sejumlah 137 Perkara;**

Dari keadaan perkara dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut jika dihubungkan dengan Sasaran Strategis berikut indikatornya maka akan diketahui capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjalankan fungsi peradilan pada tahun 2021. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :



## 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

**Tabel 8**  
Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	80%	NIHIL	80%
d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi - PK	80%	55,24%	69,05%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1			87,26%

### a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Pengukuran kinerja pada indikator ini adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Sisa perkara yang dimaksud adalah sisa perkara tahun sebelumnya.

Perlu dijelaskan disini bahwa sisa perkara tersebut, adalah merupakan perkara yang diterima pada bulan November dan Desember tahun 2020 yang tidak mungkin diselesaikan pada bulan berkenaan. Namun penyelesaian perkara tersebut tidak melebihi 3 bulan dari batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Untuk tahun 2021, sisa perkara di tahun 2020 yang harus diselesaikan adalah sebanyak 11 perkara. Adapun rincian 11 perkara tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 8.1**  
Sisa Perkara Th. 2020 yang Diselesaikan di Th. 2021

NOMOR PERKARA TINGKAT BANDING	NOMOR PERKARA TINGKAT PERTAMA	NO. PERKARA KASASI / TGL PERMOHONAN KASASI	NO. PERKARA PK / TGL PERMOHONAN PK	KETERANGAN
225/B/2020	31/2020/SMG	-	-	Lain lain
228/B/2020	50/2020/SBY	27-01-2021	106 PK/TUN/2021	Kepegawaian
230/B/2020	07/2020/YK	-	-	Lain lain
232/B/2020	51/2020/SBY	-	-	Lain lain
233/B/2020	93/2019/KPG	-	-	Kepegawaian
234/B/2020	62/2020/SBY	-	-	Lain lain
236/B/2020	99/2019/KPG	-	-	Lain lain
237/B/2020	40/2020/SMG	-	-	Lain lain
238/B/2020	60/2020/SBY	210 K/TUN/2021	-	Lain lain
239/B/2020	77/2020/SBY	-	-	Lain lain
241/B/2020	82/2020/SBY	-	-	Pertanahan

Dari tabel diatas dapat dilakukan perhitungan pengukuran kinerja untuk persentase sisa perkara yang diselesaikan sebagai berikut :

$$\frac{11 \text{ (jml. sisa perkara yang diselesaikan)}}{11 \text{ (jml. sisa perkara yang hrs diselesaikan)}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, terlihat jelas bahwa keseluruhan sisa perkara Th. 2020 telah diselesaikan pada Th. 2021, sehingga capaian kinerja untuk indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan terpenuhi sesuai yang ditargetkan yaitu **100%**

**Tabel 8.2**  
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan di Th. 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Berikut kami sajikan juga informasi capaian kinerja untuk indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan selama 3 tahun terakhir dari tahun 2019 s/d 2021 :

**Tabel 8.3**

Capaian Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan di Th. 2019 s/d 2021

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2019	TUN	45	45	100%	100%	100%
2020	TUN	37	37	100%	100%	100%
2021	TUN	11	11	100%	100%	100%

**b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah perbandingan antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan dengan Jumlah Perkara Yang Ada.

*Sebagai Tingkat Pertama :*

Selama tahun 2021 tidak ada kegiatan Pemilukada, sehingga secara otomatis tidak ada perkara Pilkada yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

*Sebagai Tingkat Banding :*

Secara keseluruhan jumlah perkara banding yang masuk di tahun 2021 adalah sejumlah 252 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2020 sebanyak 11 perkara, sehingga menjadi sejumlah 263 perkara.

Dari 263 perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan sejumlah 248 perkara termasuk didalamnya sisa perkara tahun 2020, sedangkan sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2021 adalah sejumlah 15 perkara.

Dari uraian diatas yang menjadi beban kinerja untuk diselesaikan di tahun 2021 adalah sejumlah 248 perkara, sedangkan sisa 15 perkara menjadi beban kinerja di tahun berikutnya.

Berikut tampilan gambar dari Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang menunjukkan bahwa seluruh perkara banding sejumlah 248 perkara telah diselesaikan tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, tidak melebihi batas waktu 3 bulan.

**Gambar 1**  
**Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Tepat Waktu**  
**(Pada Aplikasi SIPP)**

#	Asal Pengadilan	Nama Pemohon Banding	Nomor Perkara Tk.I	Jenis Perkara	Tgl Register	Nomor Perkara Banding	Lama Proses	Status Perkara TK Banding
1	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : HJ. SITI ZUBAIDAH KASFAH	eCourt 50/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	20 Des. 2021	252/B/2021/PT.TUN.SBY	45 hari	Minutasitanggal : 03 Feb. 2022
2	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : Imam Shofi	eCourt 64/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	20 Des. 2021	251/B/2021/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasitanggal : 12 Jan. 2022
3	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : CV. SURYA KENCANA FOOD	eCourt 69/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	15 Des. 2021	246/B/2021/PT.TUN.SBY	54 hari	Minutasitanggal : 07 Feb. 2022
4	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : SITUM	eCourt 74/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	15 Des. 2021	247/B/2021/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasitanggal : 25 Jan. 2022
5	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : TEGUH DIGDAYANTO	eCourt 75/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	15 Des. 2021	248/B/2021/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasitanggal : 12 Jan. 2022
6	TATA USAHA NEGARA MATARAM	Pembanding : ADI SALMAN, S.H.	eCourt 22/G/2021/PTUN.MTR	Lain-Lain	15 Des. 2021	250/B/2021/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasitanggal : 12 Jan. 2022
7	TATA USAHA NEGARA MATARAM	Pembanding : Prof. Dr. ABDUL AZIZ SANALI	eCourt 24/G/2021/PTUN.MTR	Pertanahan	15 Des. 2021	249/B/2021/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasitanggal : 12 Jan. 2022
8	TATA USAHA NEGARA DENPASAR	Pembanding : I Nyoman Rudang	eCourt 8/G/2021/PTUN.DPS	Pertanahan	13 Des. 2021	245/B/2021/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasitanggal : 24 Jan. 2022
9	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : Syaifulloh	eCourt 42/G/2021/PTUN.SBY	Kepegawaian	08 Des. 2021	241/B/2021/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasitanggal : 24 Jan. 2022
10	TATA USAHA NEGARA KUPANG	Pembanding : KEPALA DESA LAMAWALAN	eCourt 16/G/2021/PTUN.KPG	Lain-Lain	08 Des. 2021	242/B/2021/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasitanggal : 13 Jan. 2022
11	TATA USAHA NEGARA MATARAM	Pembanding : LALU MUJITABET	eCourt 23/G/2021/PTUN.MTR	Lain-Lain	08 Des. 2021	243/B/2021/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasitanggal : 11 Jan. 2022
12	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : USWATUN KHASANAHER	eCourt 63/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	08 Des. 2021	244/B/2021/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasitanggal : 19 Jan. 2022
13	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : ULVA atau ULFA atau MUAS	eCourt 51/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	06 Des. 2021	240/B/2021/PT.TUN.SBY	37 hari	Minutasitanggal : 19 Jan. 2022
14	TATA USAHA NEGARA MATARAM	Pembanding : Ir. I GUSTI NGURAH OKTAV	eCourt 16/G/2021/PTUN.MTR	Pertanahan	29 Nov. 2021	237/B/2021/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasitanggal : 27 Des. 2021
15	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : SuprayitnoSunartoSumars	eCourt 51/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	29 Nov. 2021	238/B/2021/PT.TUN.SBY	44 hari	Minutasitanggal : 12 Jan. 2022
16	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : Abdul Nafik Sartono	eCourt 55/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	29 Nov. 2021	239/B/2021/PT.TUN.SBY	21 hari	Minutasitanggal : 20 Des. 2021
17	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : SARIMAN HATIO MULYONO	eCourt 56/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	22 Nov. 2021	236/B/2021/PT.TUN.SBY	37 hari	Minutasitanggal : 29 Des. 2021
18	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : DIDIK AGUS ROFIYANTO	eCourt 66/G/2021/PTUN.SMG	Lelang	16 Nov. 2021	235/B/2021/PT.TUN.SBY	16 hari	Minutasitanggal : 29 Des. 2021
19	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : Sri RochaniIsnandiyah Dew	eCourt 44/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	11 Nov. 2021	234/B/2021/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasitanggal : 22 Des. 2021
20	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : A.A. Istri Ngr. Suksnasari,	eCourt 9/G/2021/PTUN.DPS	Lain-Lain	08 Nov. 2021	230/B/2021/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasitanggal : 01 Des. 2021
21	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : HARIYANTERbanding :	KEP eCourt 52/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	08 Nov. 2021	233/B/2021/PT.TUN.SBY	66 hari	Minutasitanggal : 13 Jan. 2022
22	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : Kepala Kantor Pertanahan	eCourt 28/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	08 Nov. 2021	231/B/2021/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasitanggal : 08 Des. 2021

#	Asal Pengadilan	Nama Pemohon Banding	Nomor Perkara Tk.I	Jenis Perkara	Tgl Register	Nomor Perkara Banding	Lama Proses	Status Perkara TK Banding
23	TATA USAHA NEGARA MATARAM	Pembanding : HALIMAHANDI IHWANDI	eCourt 17/G/2021/PTUN.MTR	Pertanahan	08 Nov. 2021	232/B/2021/PT.TUN.SBY	50 hari	Minutasitanggal : 28 Des.
24	TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA	Pembanding : SUBANDI KUSUMA S.H.M.H	eCourt 5/G/2021/PTUN.YK	Lain-Lain	03 Nov. 2021	228/B/2021/PT.TUN.SBY	44 hari	Minutasitanggal : 17 Des.
25	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : HARTONO, SH	eCourt 43/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	03 Nov. 2021	229/B/2021/PT.TUN.SBY	44 hari	Minutasitanggal : 17 Des.
26	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : SIEK. AGUS SANTOSO	eCourt 52/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	02 Nov. 2021	227/B/2021/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasitanggal : 02 Des.
27	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : HJ. LATIFAH	eCourt 34/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	01 Nov. 2021	226/B/2021/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasitanggal : 24 Nov.
28	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : PRAFYUDA INGHAARDI	eCourt 18/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	27 Okt. 2021	224/B/2021/PT.TUN.SBY	33 hari	Minutasitanggal : 29 Nov.
29	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : HADI SANTOSO	eCourt 41/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	27 Okt. 2021	225/B/2021/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasitanggal : 25 Nov.
30	TATA USAHA NEGARA KUPANG	Pembanding : Michael Manuel Verrelojo Nalle	eCourt 13/G/2021/PTUN.KPG	Pertanahan	26 Okt. 2021	223/B/2021/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasitanggal : 01 Des.
31	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten	eCourt 47/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	26 Okt. 2021	222/B/2021/PT.TUN.SBY	49 hari	Minutasitanggal : 14 Des.
32	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD)	eCourt 80/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	25 Okt. 2021	221/B/2021/PT.TUN.SBY	16 hari	Minutasitanggal : 10 Nov.
33	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : Ong Sing TjwanDenny Kurniawan	eCourt 27/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	25 Okt. 2021	218/B/2021/PT.TUN.SBY	37 hari	Minutasitanggal : 01 Des.
34	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : Ivan CristiantoNjo Wilson Himawan1.	eCourt 35/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	25 Okt. 2021	219/B/2021/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasitanggal : 24 Nov.
35	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : Agus Sutomo	eCourt 39/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	25 Okt. 2021	220/B/2021/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasitanggal : 24 Nov.
36	TATA USAHA NEGARA SEMARANG	Pembanding : Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan	eCourt 49/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	25 Okt. 2021	217/B/2021/PT.TUN.SBY	17 hari	Minutasitanggal : 11 Nov.
37	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : Muhaimin	eCourt 35/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	15 Okt. 2021	215/B/2021/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasitanggal : 25 Nov.
38	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : Bupati Bangkai	eCourt 37/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	15 Okt. 2021	216/B/2021/PT.TUN.SBY	46 hari	Minutasitanggal : 30 Nov.
39	TATA USAHA NEGARA KUPANG	Pembanding : FIDELIS PAN	eCourt 1/G/2021/PTUN.KPG	Pertanahan	14 Okt. 2021	213/B/2021/PT.TUN.SBY	47 hari	Minutasitanggal : 30 Nov.
40	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : Hendrik Jhon Daud	eCourt 9/G/2021/PTUN.KPG	Pertanahan	12 Okt. 2021	212/B/2021/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasitanggal : 04 Nov.
41	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : ACHMAM FHAMROZ	eCourt 60/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	11 Okt. 2021	214/B/2021/PT.TUN.SBY	31 hari	Minutasitanggal : 11 Nov.
42	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : KEPALA DINAS PERUMAH.	eCourt 55/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	01 Okt. 2021	211/B/2021/PT.TUN.SBY	25 hari	Minutasitanggal : 26 Okt.
43	TATA USAHA NEGARA DENPASAR	Pembanding : SYARIEF HIDAYAT DILAGAT	eCourt 4/G/2021/PTUN.DPS	Kepegawaian	22 Sep. 2021	210/B/2021/PT.TUN.SBY	21 hari	Minutasitanggal : 13 Okt.
44	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : SRI INDAHAWATI PRIYANA, S.Po	eCourt 21/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	22 Sep. 2021	209/B/2021/PT.TUN.SBY	19 hari	Minutasitanggal : 11 Okt.
45	TATA USAHA NEGARA SURABAYA	Pembanding : IMAM GHOZAL	eCourt 25/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	22 Sep. 2021	208/B/2021/PT.TUN.SBY	27 hari	Minutasitanggal : 19 Okt.
46	TATA USAHA NEGARA KUPANG	Pembanding : Gubernur Provinsi Nusa Tenggara	eCourt 11/G/2021/PTUN.KPG	Kepegawaian	22 Sep. 2021	207/B/2021/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasitanggal : 02 Nov.
47	TATA USAHA NEGARA MATARAM	Pembanding : Ir. HERMAN HADISANTOSO, M.BA.	eCourt 12/G/2021/PTUN.MTR	Pertanahan	15 Sep. 2021	206/B/2021/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasitanggal : 19 Okt.

Daftar Perkara (3) - Microsoft Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Asal Pengadilan	Nama Pemohon Banding	Nomor Perkara Tk1	Jenis Perkara	Tgl Register	Nomor Perkara Banding	Lama Prosi	Status Perkara TK Banding	link			
2	48 TATA USAHA NEGARA SURAB	Pembanding : FINDY FIL AFAAQINTE	eCourt 26/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	14 Sep. 2021	205/B/2021/PT.TUN.SBY	49 hari	Minutasitanggal : 02 Nov. 2021				
3	49 TATA USAHA NEGARA SEMAI	Pembanding : Suyati dkk	Terbandir eCourt 24/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	09 Sep. 2021	204/B/2021/PT.TUN.SBY	32 hari	Minutasitanggal : 11 Okt. 2021				
4	50 TATA USAHA NEGARA SURAB	Pembanding : LUCIA LUWUK	Terbandir eCourt 14/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	08 Sep. 2021	202/B/2021/PT.TUN.SBY	48 hari	Minutasitanggal : 26 Okt. 2021				
5	51 TATA USAHA NEGARA KUPAJ	Pembanding : PT. PANTAI PEDE PER	eCourt 49/G/2021/PTUN.KPG	Pertanahan	08 Sep. 2021	203/B/2021/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasitanggal : 14 Okt. 2021				
6	52 TATA USAHA NEGARA SEMAI	Pembanding : Dasino Pulp Pengrip	eCourt 30/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	08 Sep. 2021	201/B/2021/PT.TUN.SBY	54 hari	Minutasitanggal : 01 Nov. 2021				
7	53 TATA USAHA NEGARA SURAB	Pembanding : Ir. DADUK AGUSTYAN	eCourt 24/G/2021/PTUN.SBY	Kepegawaian	07 Sep. 2021	199/B/2021/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasitanggal : 19 Okt. 2021				
8	54 TATA USAHA NEGARA SURAB	Pembanding : MUHAMMAD YANG S	eCourt 27/G/2021/PTUN.SBY	Tender	07 Sep. 2021	200/B/2021/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasitanggal : 12 Okt. 2021				
9	55 TATA USAHA NEGARA KUPAJ	Pembanding : LODIA NIUTLAPU	Terbandir eCourt 57/G/2021/PTUN.KPG	Pertanahan	07 Sep. 2021	198/B/2021/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasitanggal : 05 Okt. 2021				
10	56 TATA USAHA NEGARA MATA	Pembanding : Prof. Dr. Abdul Aziz S	eCourt 11/G/2021/PTUN.MTR	Pertanahan	07 Sep. 2021	197/B/2021/PT.TUN.SBY	27 hari	Minutasitanggal : 04 Okt. 2021				
11	57 TATA USAHA NEGARA KUPAJ	Pembanding : Direktur Politeknik h	eCourt 50/G/2021/PTUN.KPG	Kepegawaian	01 Sep. 2021	193/B/2021/PT.TUN.SBY	43 hari	Minutasitanggal : 14 Okt. 2021				
12	58 TATA USAHA NEGARA KUPAJ	Pembanding : Elisabeth LausTerbandir	eCourt 52/G/2021/PTUN.KPG	Pertanahan	01 Sep. 2021	196/B/2021/PT.TUN.SBY	33 hari	Minutasitanggal : 04 Okt. 2021				
13	59 TATA USAHA NEGARA KUPAJ	Pembanding : Nasib Emilia Elm - F	eCourt 56/G/2021/PTUN.KPG	Pertanahan	01 Sep. 2021	194/B/2021/PT.TUN.SBY	43 hari	Minutasitanggal : 14 Okt. 2021				
14	60 TATA USAHA NEGARA KUPAJ	Pembanding : PALUIS SINAJAL S	eCourt 59/G/2021/PTUN.KPG	Lain-Lain	01 Sep. 2021	195/B/2021/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasitanggal : 06 Okt. 2021				
15	61 TATA USAHA NEGARA MATA	Pembanding/Terbanding : MASHU	eCourt 8/G/2021/PTUN.MTR	Pertanahan	30 Agu. 2021	192/B/2021/PT.TUN.SBY	45 hari	Minutasitanggal : 14 Okt. 2021				
16	62 TATA USAHA NEGARA SEMAI	Pembanding : SUTRISNOT	Terbandir eCourt 16/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	26 Agu. 2021	190/B/2021/PT.TUN.SBY	61 hari	Minutasitanggal : 26 Okt. 2021				
17	63 TATA USAHA NEGARA MATA	Pembanding : SAJINUMUSTIRAHM	eCourt 66/G/2021/PTUN.MTR	Pertanahan	24 Agu. 2021	189/B/2021/PT.TUN.SBY	21 hari	Minutasitanggal : 14 Sep. 2021				
18	64 TATA USAHA NEGARA SEMAI	Pembanding : Budi KirsantMusti	eCourt 20/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	24 Agu. 2021	188/B/2021/PT.TUN.SBY	49 hari	Minutasitanggal : 12 Okt. 2021				
19	65 TATA USAHA NEGARA DENP	Pembanding : I GUSTI KETUT SUHAF	eCourt 3/G/2021/PTUN.DPS	Pertanahan	24 Agu. 2021	191/B/2021/PT.TUN.SBY	63 hari	Minutasitanggal : 26 Okt. 2021				
20	66 TATA USAHA NEGARA SURAB	Pembanding : SUNAYAHSUPRIOTI	eCourt 20/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	18 Agu. 2021	187/B/2021/PT.TUN.SBY	54 hari	Minutasitanggal : 11 Okt. 2021				
21	67 TATA USAHA NEGARA SEMAI	Pembanding : Arif HidayatullahSof	eCourt 19/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	18 Agu. 2021	185/B/2021/PT.TUN.SBY	27 hari	Minutasitanggal : 14 Sep. 2021				
22	68 TATA USAHA NEGARA SEMAI	Pembanding : Sumal	Terbanding : eCourt 18/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	18 Agu. 2021	184/B/2021/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasitanggal : 28 Sep. 2021				
23	69 TATA USAHA NEGARA SEMAI	Pembanding : Muhammad Haidir	eCourt 21/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	18 Agu. 2021	186/B/2021/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasitanggal : 17 Sep. 2021				
24	70 TATA USAHA NEGARA SURAB	Pembanding : KEPALA DESA DUKUN	eCourt 11/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	16 Agu. 2021	182/B/2021/PT.TUN.SBY	22 hari	Minutasitanggal : 07 Sep. 2021				
25	71 TATA USAHA NEGARA SEMAI	Pembanding : BUPATI WONOSOBO	eCourt 25/G/2021/PTUN.SMG	Kepegawaian	16 Agu. 2021	183/B/2021/PT.TUN.SBY	49 hari	Minutasitanggal : 04 Okt. 2021				
26	72 TATA USAHA NEGARA SEMAI	Pembanding : Perkumpulan Petani	eCourt 15/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	13 Agu. 2021	180/B/2021/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasitanggal : 24 Sep. 2021				

Daftar Perkara (4) - Microsoft Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	73 TATA USA	Pembanding : Agus Rinawati,S.	eCourt 23/G/2021/PTUN.SMG	Lain-Lain	13 Agu. 2021	181/B/2021/PT.TUN.SBY	59 hari	Minutasitanggal : 11 Okt. 2021				
3	74 TATA USA	Pembanding : Wahyudi Dkk	Terbandir eCourt 12/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	03 Agu. 2021	179/B/2021/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasitanggal : 13 Sep. 2021				
4	75 TATA USA	Pembanding : JOHAN	Terbandir eCourt 5/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	27 Jul. 2021	178/B/2021/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasitanggal : 01 Sep. 2021				
5	76 TATA USA	Pembanding : KUSARIT	Terbandir eCourt 156/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	21 Jul. 2021	174/B/2021/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasitanggal : 13 Agu. 2021				
6	77 TATA USA	Pembanding : H. USMAN	Terbandir eCourt 198/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	21 Jul. 2021	175/B/2021/PT.TUN.SBY	54 hari	Minutasitanggal : 13 Sep. 2021				
7	78 TATA USA	Pembanding : EDI SUYITN	OTerbandir eCourt 2/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	21 Jul. 2021	176/B/2021/PT.TUN.SBY	33 hari	Minutasitanggal : 29 Agu. 2021				
8	79 TATA USA	Pembanding : KEPALA DESA BA	eCourt 6/G/2021/PTUN.MTR	Lain-Lain	21 Jul. 2021	177/B/2021/PT.TUN.SBY	54 hari	Minutasitanggal : 13 Sep. 2021				
9	80 TATA USA	Pembanding/Terbanding : I Wa	eCourt 29/G/2021/PTUN.DPS	Lain-Lain	19 Jul. 2021	173/B/2021/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasitanggal : 23 Agu. 2021				
10	81 TATA USA	Pembanding : JOHAN	Terbandir eCourt 4/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	14 Jul. 2021	171/B/2021/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasitanggal : 12 Agu. 2021				
11	82 TATA USA	Pembanding : PT. CITRA NUTRI	eCourt 19/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	14 Jul. 2021	172/B/2021/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasitanggal : 18 Agu. 2021				
12	83 TATA USA	Pembanding : HERMANUEL YEF	eCourt 51/G/2021/PTUN.KPG	Pertanahan	07 Jul. 2021	170/B/2021/PT.TUN.SBY	47 hari	Minutasitanggal : 23 Agu. 2021				
13	84 TATA USA	Pembanding : Kepala Kantor B	eCourt 6/G/2021/PTUN.SMG	Pajak	01 Jul. 2021	169/B/2021/PT.TUN.SBY	53 hari	Minutasitanggal : 23 Agu. 2021				
14	85 TATA USA	Pembanding : Agustina	Terbandir eCourt 169/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	29 Jun. 2021	166/B/2021/PT.TUN.SBY	37 hari	Minutasitanggal : 05 Agu. 2021				
15	86 TATA USA	Pembanding : HJ. LIANI	ABDULL eCourt 191/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	29 Jun. 2021	167/B/2021/PT.TUN.SBY	50 hari	Minutasitanggal : 18 Agu. 2021				
16	87 TATA USA	Pembanding : BUDI HARYANTO	eCourt 8/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan	29 Jun. 2021	168/B/2021/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasitanggal : 07 Jul. 2021				
17	88 TATA USA	Pembanding : SIDDEKIBISIRMA	eCourt 200/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	28 Jun. 2021	165/B/2021/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasitanggal : 03 Agu. 2021				
18	89 TATA USA	Pembanding/Terbanding : KEP.	eCourt 6/G/TF/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	28 Jun. 2021	164/B/TF/2021/PT.TUN.SBY	51 hari	Minutasitanggal : 18 Agu. 2021				
19	90 TATA USA	Pembanding : Kepala Desa Prir	eCourt 4/G/2021/PTUN.MTR	Lain-Lain	24 Jun. 2021	162/B/2021/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasitanggal : 29 Jul. 2021				
20	91 TATA USA	Pembanding : Kepala Desa Prir	eCourt 5/G/2021/PTUN.MTR	Lain-Lain	24 Jun. 2021	163/B/2021/PT.TUN.SBY	34 hari	Minutasitanggal : 28 Jul. 2021				
21	92 TATA USA	Pembanding : MUJIONOT	Terbandir eCourt 167/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	21 Jun. 2021	158/B/2021/PT.TUN.SBY	38 hari	Minutasitanggal : 29 Jul. 2021				
22	93 TATA USA	Pembanding : SUTO RIYADILAIL	eCourt 186/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain	21 Jun. 2021	159/B/2021/PT.TUN.SBY	49 hari	Minutasitanggal : 09 Agu. 2021				
23	94 TATA USA	Pembanding/Terbanding : Kep	eCourt 154/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	21 Jun. 2021	160/B/2021/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasitanggal : 27 Jul. 2021				
24	95 TATA USA	Pembanding : Soraya	Terbandir eCourt 1/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan	21 Jun. 2021	161/B/2021/PT.TUN.SBY	37 hari	Minutasitanggal : 28 Jul. 2021				
25	96 TATA USA	Pembanding : KEPALA DESA NC	eCourt 45/G/2021/PTUN.KPG	Lain-Lain	18 Jun. 2021	156/B/2021/PT.TUN.SBY	39 hari	Minutasitanggal : 27 Jul. 2021				
26	97 TATA USA	Pembanding : MOH AMIR ALITE	eCourt 47/G/2021/PTUN.KPG	Pertanahan	18 Jun. 2021	157/B/2021/PT.TUN.SBY	52 hari	Minutasitanggal : 09 Agu. 2021				

Daftar Perkara (51) - Microsoft Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	98	TATA USAHA NEGAF Pembanding : SIF1 eCourt 197/G/2020/PTUN.SBY	Pertanahan		17 Jun. 2021	153/B/2021/PT.TUN.SBY	43 hari	Minutasitanggal : 30 Jul. 2021			
3	99	TATA USAHA NEGAF Pembanding : HAF eCourt 201/G/2020/PTUN.SBY	Lain-Lain		17 Jun. 2021	154/B/2021/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasitanggal : 29 Jul. 2021			
4	100	TATA USAHA NEGAF Pembanding : SUN eCourt 206/G/2020/PTUN.SBY	Lain-Lain		17 Jun. 2021	155/B/2021/PT.TUN.SBY	49 hari	Minutasitanggal : 02 Agu. 2021			
5	101	TATA USAHA NEGAF Pembanding : DOH eCourt 1/G/2021/PTUN.SMG	Pertanahan		15 Jun. 2021	152/B/2021/PT.TUN.SBY	48 hari	Minutasitanggal : 02 Agu. 2021			
6	102	TATA USAHA NEGAF Pembanding : MAI eCourt 192/G/2020/PTUN.SBY	Pertanahan		10 Jun. 2021	150/B/2021/PT.TUN.SBY	53 hari	Minutasitanggal : 02 Agu. 2021			
7	103	TATA USAHA NEGAF Pembanding : EDV eCourt 3/G/2021/PTUN.SBY	Pertanahan		10 Jun. 2021	151/B/2021/PT.TUN.SBY	55 hari	Minutasitanggal : 04 Agu. 2021			
8	104	TATA USAHA NEGAF Pembanding : KEP eCourt 185/G/2020/PTUN.SBY	Pertanahan		09 Jun. 2021	149/B/2021/PT.TUN.SBY	54 hari	Minutasitanggal : 27 Jul. 2021			
9	105	TATA USAHA NEGAF Pembanding : KEP eCourt 65/G/2020/PTUN.MTR	Lain-Lain		03 Jun. 2021	148/B/2021/PT.TUN.SBY	19 hari	Minutasitanggal : 22 Jun. 2021			
10	106	TATA USAHA NEGAF Pembanding : HAF eCourt 71/G/2020/PTUN.MTR	Lain-Lain		03 Jun. 2021	145/B/2021/PT.TUN.SBY	33 hari	Minutasitanggal : 06 Jul. 2021			
11	107	TATA USAHA NEGAF Pembanding : KEP eCourt 72/G/2020/PTUN.MTR	Lain-Lain		03 Jun. 2021	146/B/2021/PT.TUN.SBY	67 hari	Minutasitanggal : 09 Agu. 2021			
12	108	TATA USAHA NEGAF Pembanding : KEP eCourt 73/G/2020/PTUN.MTR	Lain-Lain		03 Jun. 2021	147/B/2021/PT.TUN.SBY	53 hari	Minutasitanggal : 26 Jul. 2021			
13	109	TATA USAHA NEGAF Pembanding : KEP eCourt 74/G/2020/PTUN.MTR	Lain-Lain		03 Jun. 2021	144/B/2021/PT.TUN.SBY	18 hari	Minutasitanggal : 21 Jun. 2021			
14	110	TATA USAHA NEGAF Pembanding : HEH eCourt 168/G/2020/PTUN.SBY	Perumahan		28 Mei. 2021	142/B/2021/PT.TUN.SBY	24 hari	Minutasitanggal : 21 Jun. 2021			
15	111	TATA USAHA NEGAF Pembanding : AGC eCourt 190/G/2020/PTUN.SBY	Lain-Lain		28 Mei. 2021	143/B/2021/PT.TUN.SBY	27 hari	Minutasitanggal : 24 Jun. 2021			
16	112	TATA USAHA NEGAF Pembanding : KEP eCourt 30/G/2020/PTUN.DPS	Kepegawaian		27 Mei. 2021	141/B/2021/PT.TUN.SBY	39 hari	Minutasitanggal : 02 Jul. 2021			
17	113	TATA USAHA NEGAF Pembanding : HAL eCourt 184/G/2020/PTUN.SBY	Pertanahan		24 Mei. 2021	139/B/2021/PT.TUN.SBY	38 hari	Minutasitanggal : 08 Jul. 2021			
18	114	TATA USAHA NEGAF Pembanding : Terb eCourt 26/G/2020/PTUN.DPS	Pertanahan		24 Mei. 2021	140/B/2021/PT.TUN.SBY	21 hari	Minutasitanggal : 14 Jun. 2021			
19	115	TATA USAHA NEGAF Pembanding : Drs. eCourt 181/G/2020/PTUN.SBY	Lain-Lain		21 Mei. 2021	138/B/2021/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasitanggal : 02 Jul. 2021			
20	116	TATA USAHA NEGAF Pembanding : DIA eCourt 177/G/2020/PTUN.SBY	Lain-Lain		20 Mei. 2021	134/B/2021/PT.TUN.SBY	21 hari	Minutasitanggal : 10 Jun. 2021			
21	117	TATA USAHA NEGAF Pembanding : Mig eCourt 178/G/2020/PTUN.SBY	Pertanahan		20 Mei. 2021	135/B/2021/PT.TUN.SBY	19 hari	Minutasitanggal : 08 Jun. 2021			
22	118	TATA USAHA NEGAF Pembanding : KAA eCourt 89/G/2020/PTUN.Smg	Pertanahan		20 Mei. 2021	136/B/2021/PT.TUN.SBY	19 hari	Minutasitanggal : 08 Jun. 2021			
23	119	TATA USAHA NEGAF Pembanding : SUG eCourt 97/G/2020/PTUN.Smg	Pertanahan		20 Mei. 2021	137/B/2021/PT.TUN.SBY	20 hari	Minutasitanggal : 09 Jun. 2021			
24	120	TATA USAHA NEGAF Pembanding : FOM eCourt 157/G/2020/PTUN.SBY	Lain-Lain		03 Mei. 2021	130/B/2021/PT.TUN.SBY	39 hari	Minutasitanggal : 11 Jun. 2021			
25	121	TATA USAHA NEGAF Pembanding : PT 1 eCourt 165/G/LH/2020/PTUN.ST	Pembuangan Limbah		03 Mei. 2021	133/B/LH/2021/PT.TUN.SBY	24 hari	Minutasitanggal : 27 Mei. 2021			
26	122	TATA USAHA NEGAF Pembanding : Chn eCourt 93/G/2020/PTUN.Smg	Pertanahan		03 Mei. 2021	131/B/2021/PT.TUN.SBY	24 hari	Minutasitanggal : 27 Mei. 2021			

Daftar Perkara (7) - Microsoft Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	123	TATA USAHA Pembanding : Perkum eCourt 64/G/2020/PTUN.MTR	Lain-Lain		03 Mei. 2021	132/B/2021/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasitanggal : 08 Jun. 2021				
3	124	TATA USAHA Pembanding : MUSTAF 3/G/2020/PTUN.KPG	Pertanahan		29 Apr. 2021	129/B/2021/PT.TUN.SBY	47 hari	Minutasitanggal : 15 Jun. 2021				
4	125	TATA USAHA Pembanding : Terbandi eCourt 170/G/2020/PTUN.SBY	Pertanahan		28 Apr. 2021	128/B/2021/PT.TUN.SBY	54 hari	Minutasitanggal : 21 Jun. 2021				
5	126	TATA USAHA Pembanding : PT.SEKA eCourt 9/G/2021/PTUN.SMG	Pajak		26 Apr. 2021	127/B/2021/PT.TUN.SBY	39 hari	Minutasitanggal : 04 Jun. 2021				
6	127	TATA USAHA Pembanding : PANITIA eCourt 7/G/2021/PTUN.SBY	Lain-Lain		23 Apr. 2021	126/B/2021/PT.TUN.SBY	48 hari	Minutasitanggal : 10 Jun. 2021				
7	128	TATA USAHA Pembanding : Kepala eCourt 90/G/2020/PTUN.Smg	Lain-Lain		23 Apr. 2021	124/B/2021/PT.TUN.SBY	48 hari	Minutasitanggal : 10 Jun. 2021				
8	129	TATA USAHA Pembanding : Kepala eCourt 91/G/2020/PTUN.Smg	Lain-Lain		23 Apr. 2021	125/B/2021/PT.TUN.SBY	40 hari	Minutasitanggal : 02 Jun. 2021				
9	130	TATA USAHA Pembanding : MUAMM 50/G/2020/PTUN.MTR	Tender		20 Apr. 2021	123/B/2021/PT.TUN.SBY	13 hari	Minutasitanggal : 03 Mei. 2021				
10	131	TATA USAHA Pembanding : KEPALA eCourt 163/G/2020/PTUN.SBY	Pertanahan		19 Apr. 2021	120/B/2021/PT.TUN.SBY	46 hari	Minutasitanggal : 04 Jun. 2021				
11	132	TATA USAHA Pembanding : RUSLINT 15/G/2020/PTUN.KPG	Pertanahan		19 Apr. 2021	121/B/2021/PT.TUN.SBY	57 hari	Minutasitanggal : 15 Jun. 2021				
12	133	TATA USAHA Pembanding : Marcellir 43/G/2020/PTUN.KPG	Pertanahan		19 Apr. 2021	122/B/2021/PT.TUN.SBY	14 hari	Minutasitanggal : 03 Mei. 2021				
13	134	TATA USAHA Pembanding : JAMALU eCourt 86/G/2020/PTUN.Smg	Lain-Lain		15 Apr. 2021	119/B/2021/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasitanggal : 27 Mei. 2021				
14	135	TATA USAHA Pembanding : MARHAI 57/G/2020/PTUN.MTR	Pertanahan		15 Apr. 2021	118/B/2021/PT.TUN.SBY	18 hari	Minutasitanggal : 03 Mei. 2021				
15	136	TATA USAHA Pembanding : OKTOVI eCourt 38/G/2020/PTUN.KPG	Pertanahan		14 Apr. 2021	115/B/2021/PT.TUN.SBY	50 hari	Minutasitanggal : 03 Jun. 2021				
16	137	TATA USAHA Pembanding : RANDI R eCourt 59/G/2020/PTUN.MTR	Kepegawaian		14 Apr. 2021	116/B/2021/PT.TUN.SBY	19 hari	Minutasitanggal : 03 Mei. 2021				
17	138	TATA USAHA Pembanding : DAENG J eCourt 60/G/2020/PTUN.MTR	Pertanahan		14 Apr. 2021	117/B/2021/PT.TUN.SBY	43 hari	Minutasitanggal : 27 Mei. 2021				
18	139	TATA USAHA Pembanding : KEPALA eCourt 74/G/2020/PTUN.Smg	Lain-Lain		13 Apr. 2021	112/B/2021/PT.TUN.SBY	14 hari	Minutasitanggal : 27 Apr. 2021				
19	140	TATA USAHA Pembanding : Muham eCourt 83/G/2020/PTUN.Smg	Kepegawaian		13 Apr. 2021	114/B/2021/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasitanggal : 08 Jun. 2021				
20	141	TATA USAHA Pembanding : MUHAM eCourt 85/G/2020/PTUN.Smg	Kepegawaian		13 Apr. 2021	113/B/2021/PT.TUN.SBY	48 hari	Minutasitanggal : 31 Mei. 2021				
21	142	TATA USAHA Pembanding : Ir. EDI PI eCourt 155/G/2020/PTUN.SBY	Pertanahan		12 Apr. 2021	111/B/2021/PT.TUN.SBY	11 hari	Minutasitanggal : 23 Apr. 2021				
22	143	TATA USAHA Pembanding : NIWADII 105/G/2020/PTUN.SBY	Lain-Lain		07 Apr. 2021	110/B/2021/PT.TUN.SBY	41 hari	Minutasitanggal : 18 Mei. 2021				
23	144	TATA USAHA Pembanding : JOSEPHI 37/G/2020/PTUN.KPG	Pertanahan		05 Apr. 2021	108/B/2021/PT.TUN.SBY	56 hari	Minutasitanggal : 31 Mei. 2021				
24	145	TATA USAHA Pembanding : Drs. I M eCourt 54/G/2020/PTUN.MTR	Pertanahan		05 Apr. 2021	109/B/2021/PT.TUN.SBY	56 hari	Minutasitanggal : 02 Jun. 2021				
25	146	TATA USAHA Pembanding : AGUS TC eCourt 159/G/2020/PTUN.SBY	Lain-Lain		01 Apr. 2021	106/B/2021/PT.TUN.SBY	182 hari	Minutasitanggal : 30 Sep. 2021				
26	147	TATA USAHA Pembanding : PT.SEKA eCourt 2/G/2021/PTUN.SMG	Pajak		01 Apr. 2021	107/B/2021/PT.TUN.SBY	68 hari	Minutasitanggal : 08 Jun. 2021				

Daftar Perkara (8) - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	148	TATA USAHA NEGAF Pembanding : Suw eCourt 82/G/2020/PTUN.Smg		Pertanahan	31 Mar. 2021	105/8/2021/PT.TUN.SBY		57 hari	Minutasitanggal : 27 Mei. 2021			
3	149	TATA USAHA NEGAF Pembanding : KEP eCourt 61/G/2020/PTUN.MTR		Pertanahan	30 Mar. 2021	103/8/2021/PT.TUN.SBY		28 hari	Minutasitanggal : 27 Apr. 2021			
4	150	TATA USAHA NEGAF Pembanding : Kepi eCourt 62/G/2020/PTUN.MTR		Lain-Lain	30 Mar. 2021	104/8/2021/PT.TUN.SBY		23 hari	Minutasitanggal : 22 Apr. 2021			
5	151	TATA USAHA NEGAF Pembanding : Kepi eCourt 76/G/2020/PTUN.Smg		Lain-Lain	29 Mar. 2021	101/8/2021/PT.TUN.SBY		23 hari	Minutasitanggal : 21 Apr. 2021			
6	152	TATA USAHA NEGAF Pembanding : SUR eCourt 88/G/2020/PTUN.Smg		Lain-Lain	29 Mar. 2021	102/8/2021/PT.TUN.SBY		18 hari	Minutasitanggal : 16 Apr. 2021			
7	153	TATA USAHA NEGAF Pembanding : Sam eCourt 73/G/2020/PTUN.Smg		Pertanahan	25 Mar. 2021	96/8/2021/PT.TUN.SBY		12 hari	Minutasitanggal : 06 Apr. 2021			
8	154	TATA USAHA NEGAF Pembanding : KEPi eCourt 78/G/2020/PTUN.Smg		Lain-Lain	25 Mar. 2021	97/8/2021/PT.TUN.SBY		26 hari	Minutasitanggal : 20 Apr. 2021			
9	155	TATA USAHA NEGAF Pembanding : OKT eCourt 34/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	25 Mar. 2021	98/8/2021/PT.TUN.SBY		63 hari	Minutasitanggal : 27 Mei. 2021			
10	156	TATA USAHA NEGAF Pembanding : FRE eCourt 36/G/2020/PTUN.KPG		Kepegawaian	25 Mar. 2021	95/8/2021/PT.TUN.SBY		21 hari	Minutasitanggal : 15 Apr. 2021			
11	157	TATA USAHA NEGAF Pembanding : PT. I eCourt 41/G/2020/PTUN.KPG		Tender	25 Mar. 2021	99/8/2021/PT.TUN.SBY		40 hari	Minutasitanggal : 04 Mei. 2021			
12	158	TATA USAHA NEGAF Pembanding : PT. I eCourt 42/G/2020/PTUN.KPG		Tender	25 Mar. 2021	100/8/2021/PT.TUN.SBY		40 hari	Minutasitanggal : 04 Mei. 2021			
13	159	TATA USAHA NEGAF Pembanding : RUKI eCourt 20/G/2020/PTUN.YK		Perjinaan	23 Mar. 2021	94/8/2021/PT.TUN.SBY		22 hari	Minutasitanggal : 14 Apr. 2021			
14	160	TATA USAHA NEGAF Pembanding : HERI 29/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	23 Mar. 2021	92/8/2021/PT.TUN.SBY		34 hari	Minutasitanggal : 26 Apr. 2021			
15	161	TATA USAHA NEGAF Pembanding : IRAH 32/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	23 Mar. 2021	93/8/2021/PT.TUN.SBY		63 hari	Minutasitanggal : 25 Mei. 2021			
16	162	TATA USAHA NEGAF Pembanding : Kepi eCourt 75/G/2020/PTUN.SMG		Lain-Lain	22 Mar. 2021	91/8/2021/PT.TUN.SBY		30 hari	Minutasitanggal : 21 Apr. 2021			
17	163	TATA USAHA NEGAF Pembanding : Kus 34/G/2020/PTUN.Smg		Lain-Lain	19 Mar. 2021	86/8/2021/PT.TUN.SBY		76 hari	Minutasitanggal : 03 Jun. 2021			
18	164	TATA USAHA NEGAF Pembanding : NI Ka 19/G/2020/PTUN.MTR		Pertanahan	19 Mar. 2021	88/8/2021/PT.TUN.SBY		39 hari	Minutasitanggal : 27 Apr. 2021			
19	165	TATA USAHA NEGAF Pembanding : HEN 26/G/2020/PTUN.KPG		Kepegawaian	19 Mar. 2021	87/8/2021/PT.TUN.SBY		34 hari	Minutasitanggal : 22 Apr. 2021			
20	166	TATA USAHA NEGAF Pembanding : IRAH 30/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	19 Mar. 2021	89/8/2021/PT.TUN.SBY		42 hari	Minutasitanggal : 30 Apr. 2021			
21	167	TATA USAHA NEGAF Pembanding : FUJI 31/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	19 Mar. 2021	84/8/2021/PT.TUN.SBY		28 hari	Minutasitanggal : 16 Apr. 2021			
22	168	TATA USAHA NEGAF Pembanding : DINI 35/G/2020/PTUN.KPG		Kepegawaian	19 Mar. 2021	85/8/2021/PT.TUN.SBY		48 hari	Minutasitanggal : 06 Mei. 2021			
23	169	TATA USAHA NEGAF Pembanding : I Ma 18/G/2020/PTUN.DPS		Pertanahan	19 Mar. 2021	89/8/2021/PT.TUN.SBY		33 hari	Minutasitanggal : 21 Apr. 2021			
24	170	TATA USAHA NEGAF Pembanding : I Wa 19/G/2020/PTUN.DPS		Pertanahan	19 Mar. 2021	90/8/2021/PT.TUN.SBY		41 hari	Minutasitanggal : 29 Apr. 2021			
25	171	TATA USAHA NEGAF Pembanding : KEPi 134/G/2020/PTUN.SBY		Pertanahan	10 Mar. 2021	81/8/2021/PT.TUN.SBY		36 hari	Minutasitanggal : 15 Apr. 2021			
26	172	TATA USAHA NEGAF Pembanding/Terbi eCourt 142/G/2020/PTUN.SBY		Pertanahan	10 Mar. 2021	82/8/2021/PT.TUN.SBY		34 hari	Minutasitanggal : 13 Apr. 2021			

Daftar Perkara (9) - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	173	TATA USAHA NEGA Pembanding : Sholikin, S 57/G/2020/PTUN.Smg		Lain-Lain	10 Mar. 2021	79/8/2021/PT.TUN.SBY		42 hari	Minutasitanggal : 21 Apr. 2021			
3	174	TATA USAHA NEGA Pembanding : RUSLINter 10/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	10 Mar. 2021	78/8/2021/PT.TUN.SBY		33 hari	Minutasitanggal : 12 Apr. 2021			
4	175	TATA USAHA NEGA Pembanding : I Ketut. Ku. 12/G/2020/PTUN.DPS		Pertanahan	10 Mar. 2021	80/8/2021/PT.TUN.SBY		41 hari	Minutasitanggal : 20 Apr. 2021			
5	176	TATA USAHA NEGA Pembanding : ABD. WAR 135/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	09 Mar. 2021	74/8/2021/PT.TUN.SBY		51 hari	Minutasitanggal : 29 Apr. 2021			
6	177	TATA USAHA NEGA Pembanding : KEPALA KJ 139/G/2020/PTUN.SBY		Pertanahan	09 Mar. 2021	75/8/2021/PT.TUN.SBY		49 hari	Minutasitanggal : 27 Apr. 2021			
7	178	TATA USAHA NEGA Pembanding : LSM BONG 144/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	09 Mar. 2021	76/8/2021/PT.TUN.SBY		35 hari	Minutasitanggal : 13 Apr. 2021			
8	179	TATA USAHA NEGA Pembanding : SUBAHAN 149/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	09 Mar. 2021	77/8/2021/PT.TUN.SBY		30 hari	Minutasitanggal : 08 Apr. 2021			
9	180	TATA USAHA NEGA Pembanding : Achmad Si eCourt 79/G/2020/PTUN.Smg		Pertanahan	09 Mar. 2021	73/8/2021/PT.TUN.SBY		20 hari	Minutasitanggal : 29 Mar. 2021			
10	181	TATA USAHA NEGA Pembanding : HANI FAT eCourt 141/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	08 Mar. 2021	72/8/2021/PT.TUN.SBY		15 hari	Minutasitanggal : 23 Mar. 2021			
11	182	TATA USAHA NEGA Pembanding : H. MUHSIH 37/G/2020/PTUN.MTR		Pertanahan	04 Mar. 2021	67/8/2021/PT.TUN.SBY		22 hari	Minutasitanggal : 26 Mar. 2021			
12	183	TATA USAHA NEGA Pembanding : MASNAYO 101/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	04 Mar. 2021	68/8/2021/PT.TUN.SBY		32 hari	Minutasitanggal : 05 Apr. 2021			
13	184	TATA USAHA NEGA Pembanding : SATTAMTe 102/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	04 Mar. 2021	69/8/2021/PT.TUN.SBY		35 hari	Minutasitanggal : 08 Apr. 2021			
14	185	TATA USAHA NEGA Pembanding : MUSTOFA 104/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	04 Mar. 2021	70/8/2021/PT.TUN.SBY		48 hari	Minutasitanggal : 21 Apr. 2021			
15	186	TATA USAHA NEGA Pembanding : SUNAHRA 106/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	04 Mar. 2021	71/8/2021/PT.TUN.SBY		46 hari	Minutasitanggal : 21 Apr. 2021			
16	187	TATA USAHA NEGA Pembanding : MUKHAMM eCourt 147/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	02 Mar. 2021	65/8/2021/PT.TUN.SBY		16 hari	Minutasitanggal : 18 Mar. 2021			
17	188	TATA USAHA NEGA Pembanding : RENTINUS 28/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	02 Mar. 2021	64/8/2021/PT.TUN.SBY		79 hari	Minutasitanggal : 20 Mei. 2021			
18	189	TATA USAHA NEGA Pembanding : I Made Lili eCourt 21/G/2020/PTUN.DPS		Kepegawaian	02 Mar. 2021	66/8/2021/PT.TUN.SBY		14 hari	Minutasitanggal : 16 Mar. 2021			
19	190	TATA USAHA NEGA Pembanding : SAHABUDI4/G/2020/PTUN.KPG		Lain-Lain	01 Mar. 2021	62/8/2021/PT.TUN.SBY		22 hari	Minutasitanggal : 23 Mar. 2021			
20	191	TATA USAHA NEGA Pembanding : PT.ALDILA eCourt 68/G/2020/PTUN.Smg		Tender	01 Mar. 2021	61/8/2021/PT.TUN.SBY		9 hari	Minutasitanggal : 10 Mar. 2021			
21	192	TATA USAHA NEGA Pembanding : SADITerba95/G/2020/PTUN.SBY		Pertanahan	01 Mar. 2021	63/8/2021/PT.TUN.SBY		42 hari	Minutasitanggal : 12 Apr. 2021			
22	193	TATA USAHA NEGA Pembanding : SAHRILTer 9/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	24 Feb. 2021	55/8/2021/PT.TUN.SBY		43 hari	Minutasitanggal : 08 Apr. 2021			
23	194	TATA USAHA NEGA Pembanding : SITI MARY. 40/G/2020/PTUN.MTR		Pertanahan	24 Feb. 2021	57/8/2021/PT.TUN.SBY		29 hari	Minutasitanggal : 25 Mar. 2021			
24	195	TATA USAHA NEGA Pembanding : MASHOD4 103/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	24 Feb. 2021	58/8/2021/PT.TUN.SBY		50 hari	Minutasitanggal : 15 Apr. 2021			
25	196	TATA USAHA NEGA Pembanding : GUMIRLAP 11/G/2020/PTUN.YK		Tender	24 Feb. 2021	56/8/2021/PT.TUN.SBY		8 hari	Minutasitanggal : 04 Mar. 2021			
26	197	TATA USAHA NEGA Pembanding : KEPALA DI 120/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	24 Feb. 2021	59/8/2021/PT.TUN.SBY		49 hari	Minutasitanggal : 14 Apr. 2021			

Daftar Perkara (10) - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	198	TATA USA Pembandi 121/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	24 Feb. 2021	60/8/2021/PT.TUN.SBY	43 hari	Minutasitanggal : 08 Apr. 2021					
3	199	TATA USA Pembandi eCourt 63/G/2020/PTUN.Smg		Kepegawaian	22 Feb. 2021	53/8/2021/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasitanggal : 24 Mar. 2021					
4	200	TATA USA Pembandi 14/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	22 Feb. 2021	51/8/2021/PT.TUN.SBY	44 hari	Minutasitanggal : 07 Apr. 2021					
5	201	TATA USA Pembandi eCourt 16/G/2020/PTUN.DPS		Lain-Lain	22 Feb. 2021	52/8/2021/PT.TUN.SBY	7 hari	Minutasitanggal : 01 Mar. 2021					
6	202	TATA USA Pembandi eCourt 17/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	22 Feb. 2021	54/8/2021/PT.TUN.SBY	10 hari	Minutasitanggal : 16 Mar. 2021					
7	203	TATA USA Pembandi eCourt 122/G/2020/PTUN.SBY		Pertanahan	19 Feb. 2021	50/8/2021/PT.TUN.SBY	25 hari	Minutasitanggal : 16 Mar. 2021					
8	204	TATA USA Pembandi 61/G/2020/PTUN.Smg		Lain-Lain	18 Feb. 2021	49/8/2021/PT.TUN.SBY	11 hari	Minutasitanggal : 01 Mar. 2021					
9	205	TATA USA Pembandi 11/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	18 Feb. 2021	48/8/2021/PT.TUN.SBY	47 hari	Minutasitanggal : 06 Apr. 2021					
10	206	TATA USA Pembandi 82/G/2019/PTUN.KPG		Pertanahan	16 Feb. 2021	46/8/2021/PT.TUN.SBY	22 hari	Minutasitanggal : 10 Mar. 2021					
11	207	TATA USA Pembandi 13/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	16 Feb. 2021	47/8/2021/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasitanggal : 23 Mar. 2021					
12	208	TATA USA Pembandi 10/G/2020/PTUN.YK		Pertanahan	11 Feb. 2021	45/8/2021/PT.TUN.SBY	46 hari	Minutasitanggal : 29 Mar. 2021					
13	209	TATA USA Pembandi 1/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	10 Feb. 2021	43/8/2021/PT.TUN.SBY	54 hari	Minutasitanggal : 05 Apr. 2021					
14	210	TATA USA Pembandi 27/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	10 Feb. 2021	44/8/2021/PT.TUN.SBY	15 hari	Minutasitanggal : 25 Feb. 2021					
15	211	TATA USA Pembandi eCourt 123/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	09 Feb. 2021	42/8/2021/PT.TUN.SBY	35 hari	Minutasitanggal : 17 Mar. 2021					
16	212	TATA USA Pembandi eCourt 62/G/2020/PTUN.Smg		Lain-Lain	08 Feb. 2021	41/8/2021/PT.TUN.SBY	9 hari	Minutasitanggal : 17 Feb. 2021					
17	213	TATA USA Pembandi 83/G/2020/PTUN.SBY		Pertanahan	04 Feb. 2021	38/8/2021/PT.TUN.SBY	26 hari	Minutasitanggal : 02 Mar. 2021					
18	214	TATA USA Pembandi 100/G/2020/PTUN.SBY		Kepegawaian	04 Feb. 2021	39/8/2021/PT.TUN.SBY	27 hari	Minutasitanggal : 03 Mar. 2021					
19	215	TATA USA Pembandi 110/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	04 Feb. 2021	40/8/2021/PT.TUN.SBY	48 hari	Minutasitanggal : 15 Mar. 2021					
20	216	TATA USA Pembandi 100/G/2019/PTUN.KPG		Pertanahan	02 Feb. 2021	37/8/2021/PT.TUN.SBY	49 hari	Minutasitanggal : 23 Mar. 2021					
21	217	TATA USA Pembandi 92/G/2019/PTUN.KPG		Kepegawaian	01 Feb. 2021	34/8/2021/PT.TUN.SBY	17 hari	Minutasitanggal : 18 Feb. 2021					
22	218	TATA USA Pembandi 60/G/2020/PTUN.Smg		Pertanahan	01 Feb. 2021	36/8/2021/PT.TUN.SBY	16 hari	Minutasitanggal : 17 Feb. 2021					
23	219	TATA USA Pembandi 38/G/2020/PTUN.MTR		Lain-Lain	01 Feb. 2021	35/8/2021/PT.TUN.SBY	30 hari	Minutasitanggal : 03 Mar. 2021					
24	220	TATA USA Pembandi 73/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	01 Feb. 2021	33/8/2021/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasitanggal : 15 Mar. 2021					
25	221	TATA USA Pembandi 50/G/2019/PTUN.KPG		Pertanahan	28 Jan. 2021	32/8/2021/PT.TUN.SBY	13 hari	Minutasitanggal : 10 Feb. 2021					
26	222	TATA USA Pembandi eCourt 145/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	26 Jan. 2021	31/8/2021/PT.TUN.SBY	9 hari	Minutasitanggal : 04 Feb. 2021					

Daftar Perkara (11) - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	223	TATA USA Pembandi 32/G/2020/PTUN.MTR		Lain-Lain	26 Jan. 2021	29/8/2021/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasitanggal : 18 Feb. 2021				
3	224	TATA USA Pembandi 41/G/2020/PTUN.MTR		Pertanahan	26 Jan. 2021	30/8/2021/PT.TUN.SBY	31 hari	Minutasitanggal : 26 Feb. 2021				
4	225	TATA USA Pembandi 45/G/2020/PTUN.MTR		Lain-Lain	26 Jan. 2021	28/8/2021/PT.TUN.SBY	15 hari	Minutasitanggal : 10 Feb. 2021				
5	226	TATA USA Pembandi 72/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	20 Jan. 2021	24/8/2021/PT.TUN.SBY	21 hari	Minutasitanggal : 10 Feb. 2021				
6	227	TATA USA Pembandi 74/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	20 Jan. 2021	25/8/2021/PT.TUN.SBY	48 hari	Minutasitanggal : 09 Mar. 2021				
7	228	TATA USA Pembandi 78/G/2020/PTUN.SBY		Pertanahan	20 Jan. 2021	26/8/2021/PT.TUN.SBY	43 hari	Minutasitanggal : 04 Mar. 2021				
8	229	TATA USA Pembandi 88/G/2020/PTUN.SBY		Pertanahan	20 Jan. 2021	27/8/2021/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasitanggal : 17 Feb. 2021				
9	230	TATA USA Pembandi 78/G/2019/PTUN.KPG		Kepegawaian	19 Jan. 2021	20/8/2021/PT.TUN.SBY	29 hari	Minutasitanggal : 17 Feb. 2021				
10	231	TATA USA Pembandi 44/G/2020/PTUN.Smg		Lain-Lain	19 Jan. 2021	22/8/2021/PT.TUN.SBY	55 hari	Minutasitanggal : 15 Mar. 2021				
11	232	TATA USA Pembandi 66/G/2020/PTUN.Smg		Lelang	19 Jan. 2021	23/8/2021/PT.TUN.SBY	38 hari	Minutasitanggal : 26 Feb. 2021				
12	233	TATA USA Pembandi 24/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	19 Jan. 2021	21/8/2021/PT.TUN.SBY	20 hari	Minutasitanggal : 08 Feb. 2021				
13	234	TATA USA Pembandi 6/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	18 Jan. 2021	17/8/2021/PT.TUN.SBY	16 hari	Minutasitanggal : 03 Feb. 2021				
14	235	TATA USA Pembandi 67/G/2020/PTUN.Smg		Lelang	18 Jan. 2021	18/8/2021/PT.TUN.SBY	16 hari	Minutasitanggal : 03 Feb. 2021				
15	236	TATA USA Pembandi 72/G/2020/PTUN.Smg		Lelang	18 Jan. 2021	19/8/2021/PT.TUN.SBY	42 hari	Minutasitanggal : 01 Mar. 2021				
16	237	TATA USA Pembandi 28/G/2020/PTUN.MTR		Pertanahan	12 Jan. 2021	16/8/2021/PT.TUN.SBY	21 hari	Minutasitanggal : 02 Feb. 2021				
17	238	TATA USA Pembandi 75/G/2019/PTUN.KPG		Kepegawaian	11 Jan. 2021	13/8/2021/PT.TUN.SBY	18 hari	Minutasitanggal : 29 Jan. 2021				
18	239	TATA USA Pembandi 23/G/2020/PTUN.MTR		Pertanahan	11 Jan. 2021	14/8/2021/PT.TUN.SBY	51 hari	Minutasitanggal : 03 Mar. 2021				
19	240	TATA USA Pembandi 31/G/2020/PTUN.MTR		Lain-Lain	11 Jan. 2021	15/8/2021/PT.TUN.SBY	16 hari	Minutasitanggal : 27 Jan. 2021				
20	241	TATA USA Pembandi eCourt 36/G/2020/PTUN.MTR		Lain-Lain	07 Jan. 2021	12/8/2021/PT.TUN.SBY	12 hari	Minutasitanggal : 19 Jan. 2021				
21	242	TATA USA Pembandi 57/G/2019/PTUN.KPG		Kepegawaian	06 Jan. 2021	1/8/2021/PT.TUN.SBY	14 hari	Minutasitanggal : 20 Jan. 2021				
22	243	TATA USA Pembandi 77/G/2019/PTUN.KPG		Kepegawaian	06 Jan. 2021	2/8/2021/PT.TUN.SBY	21 hari	Minutasitanggal : 27 Jan. 2021				
23	244	TATA USA Pembandi 24/G/2020/PTUN.MTR		Pertanahan	06 Jan. 2021	6/8/2021/PT.TUN.SBY	23 hari	Minutasitanggal : 29 Jan. 2021				
24	245	TATA USA Pembandi 27/G/2020/PTUN.MTR		Lain-Lain	06 Jan. 2021	5/8/2021/PT.TUN.SBY	22 hari	Minutasitanggal : 28 Jan. 2021				
25	246	TATA USA Pembandi 22/G/2020/PTUN.KPG		Pertanahan	06 Jan. 2021	3/8/2021/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasitanggal : 28 Jan. 2021				
26	247	TATA USA Pembandi 80/G/2020/PTUN.SBY		Lain-Lain	06 Jan. 2021	7/8/2021/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasitanggal : 11 Feb. 2021				



#	Asal Peng Nama Per	Nomor Perkara TK.I	Jenis Perkara	Tgl Register	Nomor Perkara Banding	Lama Proc	Status Perkara TK Banding	link
248	TATA USA Pemband	81/G/2020/PTUN.SBY	Lain-Lain	06 Jan. 2021	8/B/2021/PT.TUN.SBY	36 hari	Minutasitanggal : 11 Feb. 2021	
249	TATA USA Pemband	89/G/2020/PTUN.SBY	Pertanahan	06 Jan. 2021	9/B/2021/PT.TUN.SBY	43 hari	Minutasitanggal : 18 Feb. 2021	
250	TATA USA Pemband	90/G/2020/PTUN.SBY	Kepegawaian	06 Jan. 2021	10/B/2021/PT.TUN.SBY	26 hari	Minutasitanggal : 01 Feb. 2021	
251	TATA USA Pemband	92/G/2020/PTUN.SBY	Lain-Lain	06 Jan. 2021	11/B/2021/PT.TUN.SBY	27 hari	Minutasitanggal : 02 Feb. 2021	
252	TATA USA Pemband	11/G/2020/PTUN.DPS	Lain-Lain	06 Jan. 2021	4/B/2021/PT.TUN.SBY	28 hari	Minutasitanggal : 03 Feb. 2021	

Dari uraian dan gambar diatas dapat dilakukan perhitungan pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebagai berikut :

$$\frac{248 \text{ (jml. perkara yang diselesaikan tepat waktu)}}{248 \text{ (jml. perkara yang diselesaikan)}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka target untuk pengukuran indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 100% telah tercapai, sehingga capaian untuk kinerja indikator ini sebesar **100%**.

**Tabel 8.4**

Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu di Th. 2019 s/d 2021

No	Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	TUN	298	100%	100%	100%
2.	2020	TUN	265	100%	100%	100%
3.	2021	TUN	248	100%	100%	100%

**c. Persentase Penurunan Sisa Perkara**

Pengukuran untuk indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara adalah perbandingan antara Sisa Perkara Tahun Sebelumnya dikurangi Sisa Perkara Tahun Berjalan dengan Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.

Sebagaimana dijelaskan diatas sisa perkara tahun sebelumnya adalah sejumlah 11 perkara dikurangi sisa perkara tahun berjalan sejumlah 15 perkara, kemudian dibagi sisa perkara tahun sebelumnya, lalu dikali 100%. Hal ini dijabarkan dalam perhitungan seperti di bawah ini :

$$\frac{11 - 15}{11} \times 100\% = -36,36\%$$

Dari perhitungan ini, didapat jumlah sebesar -36,36%, sehingga perbandingan antara realisasi dengan target didapat angka sebesar **-45,45%**.

Dari persentase sebesar -45,45% tersebut berarti target indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara **tidak terpenuhi bahkan minus**.

Namun demikian bagi kami, pengukuran indikator Persentase Sisa Perkara ini, **kurang tepat** untuk dijadikan indikator, dikarenakan setiap tahun jumlah perkara yang masuk, diselesaikan dan diputus tidak sama sehingga sisa perkara pun tidak akan sama. Terutama untuk perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan November dan Desember yang memungkinkan menjadi sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya pada tiap tahunnya tidaklah sama.

**Besar kecilnya sisa perkara tidak otomatis menunjukkan kinerja baik atau buruk**, karena banyak faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian suatu perkara selama penyelesaiannya tidak melampaui batas waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga pengukuran indikator dengan rumus diatas, **pasti saat akan memunculkan hasil yang minus**.

Apa artinya dilakukan pengukuran naik turunnya sisa perkara, jika setiap sisa perkara diselesaikan tepat pada waktunya? Bukankah ini sudah cukup membuktikan kinerja yang baik?

Pencantuman hasil pengukuran dalam realisasi sebesar -36,36% dan capaian sebesar -45,45%, adalah wujud ketaatan kami mengikuti sistem pengukuran untuk indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara ini, namun demikian pada kenyataannya setiap perkara yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah diselesaikan tepat waktu tanpa melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.

Oleh karenanya, kami menolak dan menyarankan untuk melakukan **evaluasi kembali** terhadap pengukuran kinerja dengan indikator Persentase Sisa Perkara ini. Sehingga di dalam tabel akan kami cantumkan persentase untuk Realisasi sebesar **NIHIL** dan persentase untuk Capaian sebesar target yaitu **80%**

**Tabel 8.5**

Capaian Persentase Penurunan Sisa Perkara di Th. 2019 s/d 2021

No	Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	TUN	37	80%	17,77%	22,21%
2.	2020	TUN	11	80%	70,27%	87,83%
3.	2021	TUN	15	80%	NIHIL	80%

**d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK**

Pada indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Berdasarkan data dari tingkat pertama di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selama tahun 2021 perkara yang mengajukan upaya hukum, tergambar dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 8.6**

Rekapitulasi Perkara Yang Mengajukan Kasasi Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	40
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	23
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	2
4.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	5
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	1
6.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	23
	<b>Jumlah Total</b>	<b>94</b>

**Tabel 8.7**

Rekapitulasi Perkara Yang Mengajukan PK Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	11
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	2
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	-
4.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	-
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	1
6.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	3
	<b>Jumlah Total</b>	<b>17</b>

Dari tabel diatas, terlihat bahwa perkara yang mengajukan Kasasi sebanyak 94 perkara dan yang mengajukan PK sebanyak 17 perkara, sehingga perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK sebanyak 111 perkara.

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun 2021 sebanyak 248 perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi maupun PK sebanyak **137 perkara**.

Jika dilakukan pengukuran terhadap indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$\frac{137}{248} \times 100\% = 55,24\%$$

Dari pengukuran diatas, didapat sejumlah 55,24% untuk realisasi indikator ini, sehingga jika dihitung capaian dari indikator ini adalah sebesar **69,05%**.

Jumlah sebesar 69,05% jika dibandingkan dengan target 80% tentunya tidak tercapai, namun demikian indikator ini **perlu dikaji ulang**, karena pengajuan upaya hukum Kasasi maupun PK oleh pihak yang berperkara tentunya berkaitan dengan kepuasan para pihak atas putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan. Kepuasan para pihak tentunya berkaitan dengan rasa keadilan atas hasil putusan yang diterima, karena para pihak berhak merasa tidak puas dan tidak adil atas putusan Pengadilan. Untuk bisa menakar adil atau tidaknya suatu putusan, tentunya butuh kajian mendalam mengenai materi perkaranya, dan hal ini butuh waktu yang panjang.

Oleh karena itu, capaian indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebesar **69,05%** tidak serta merta mengindikasikan kinerja yang buruk atau baik dalam memutus dan menyelesaikan perkara.

**Tabel 8.8**

Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK di Th. 2019 s/d 2021

No	Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	TUN	124	80%	41,61%	52,01%
2.	2020	TUN	101	80%	38,11%	47,63%
3.	2021	TUN	137	80%	55,24%	69,05%

## 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

**Tabel 9**  
Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Dalam 1 Hari Setelah Perkara Putus	100%	NIHIL	100%

### a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Perbandingan Jumlah Salinan Putusan Tingkat Banding Yang Dikirim Tepat Waktu dengan Jumlah Putusan adalah cara pengukuran indikator ini.

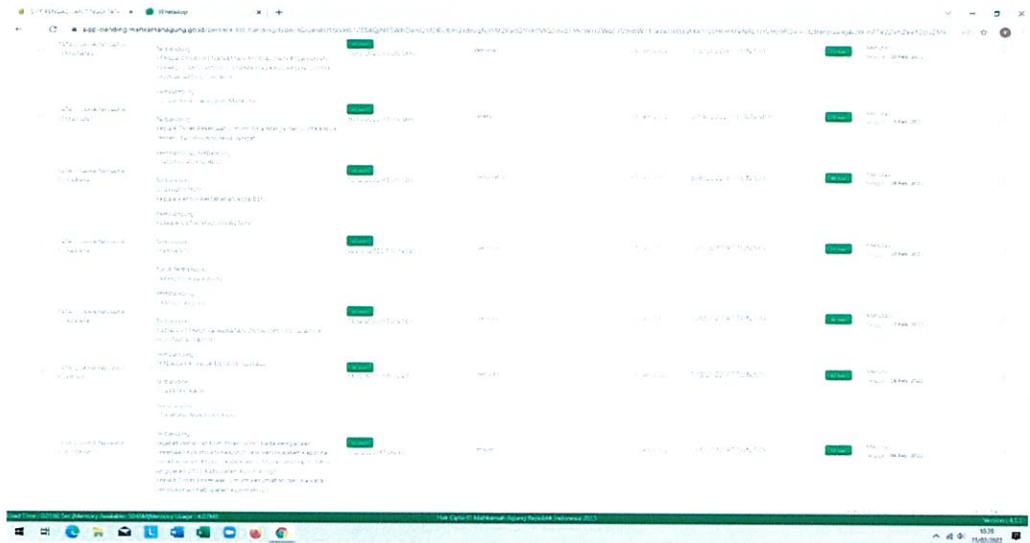
Dari keseluruhan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2021 sejumlah 248 perkara telah dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu. Pengukuran indikator ini dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\frac{248}{248} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan pengukuran diatas target 100% untuk indikator Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu telah tercapai.

Dengan diberlakukannya E-Court, pengiriman dilakukan secara digital melalui Aplikasi SIPP. Pemanfaatan Teknologi Informasi ini membantu mempercepat penyampaian salinan putusan ke Pengadilan Pengaju sehingga tepat waktu. Berikut bukti Screenshoot pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju melalui Aplikasi SIPP :

**Gambar 2**  
Bukti Pengiriman Salinan Putusan Secara Digital di Aplikasi SIPP



Dari salah satu bukti gambar diatas, setelah perkara putus hingga diminutasi dengan tidak melebihi waktu 3 bulan penyelesaian perkara sesuai surat SEMA No. 2 Tahun 2014, maka berkas perkara langsung dikirim ke pengadilan pengaju. Untuk itu, target indikator Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu sebesar 100% telah terpenuhi untuk keseluruhan perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun 2021 sejumlah 248 perkara (100%). Sehingga capaian untuk indikator ini adalah sebesar **100%**.

**Tabel 9.1**  
Capaian Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju  
Tepat Waktu di Th. 2019 s/d 2021

No	Tahun	Jenis Perkara	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Ke Pengadilan Pengaju	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	TUN	298	100%	100%	100%
2.	2020	TUN	265	100%	100%	100%
3.	2021	TUN	248	100%	100%	100%

**b. Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Dalam 1 Hari Setelah Perkara Putus**

Pengukuran indikator ini adalah perbandingan antara Jumlah Putusan Yang Dapat Diakses Dalam 1 Hari dengan Jumlah Perkara Diputus.

Indikator ini berlaku untuk penyelesaian sengketa Pilkada, selama tahun 2021 tidak ada kegiatan Pemilukada, sehingga tidak ada perkara Pilkada yang diterima maupun diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Oleh karena Realisasi untuk indikator ini kami cantumkan sebesar **NIHIL** dan Capaian untuk indikator ini kami cantumkan sebesar **100%**.

**Tabel 9.2**

Capaian Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Dalam 1 Hari Setelah Perkara Putus di Th. 2019 s/d 2021

No	Tahun	Jenis Perkara	Perkara Pilkada Yang Dapat Diakses Dalam 1 Hari Setelah Diputus	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	TUN	NIHIL	100%	NIHIL	100%
2.	2020	TUN	3	100%	100%	100%
3.	2020	TUN	NIHIL	100%	NIHIL	100%

Sasaran Strategis 3 dan 4 yaitu Peningkatan Kualitas SDM dan Peningkatan Kualitas Pengawasan merupakan sasaran strategis tambahan yang menjadi prioritas untuk ditetapkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selain Sasaran Strategis point 1 dan 2 yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

### 3. Peningkatan Kualitas SDM

**Tabel 10**

Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3			
Peningkatan Kualitas SDM			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
• Persentase Pembinaan ke Daerah	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja			100%

- **Persentase Pembinaan ke Daerah**

Pengukuran indikator Persentase Pembinaan ke Daerah adalah terlaksananya Pembinaan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ke satuan kerja di wilayah hukumnya.

Kegiatan pembinaan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan. Secara formalnya, dilakukan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa kekurangan dan penyimpangan yang terjadi.

Pembinaan secara informal baik melalui media social seperti grup WhatsApp, juga dilakukan oleh pimpinan dan tiap-tiap bagian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ke seluruh satker di daerah terkait sosialisasi peraturan maupun kebijakan pimpinan dan Mahkamah Agung RI.

Untuk Tahun Anggaran 2021 ini, Pembinaan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ke seluruh satuan kerja di daerah dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan selama Pandemi Covid-19 yang belum mereda, dengan rincian kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/572/PS.04/3/2021 tanggal 12 Maret 2021 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 19 Maret 2021;
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/644/PS.04/3/2021 tanggal 22 Maret 2021 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, yang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 26 Maret 2021;
- 3) Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/602/PS.04/3/2021 tanggal 22 Maret 2021 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret s/d 1 April 2021;



- 4) Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1060/PS.04/6/2021 tanggal 14 Juni 2021 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**, yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 18 Juni 2021;
  - 5) Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1409/PS.04/9/2021 tanggal 24 September 2021 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 September 2021;
  - 6) Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1666/PS.04/11/2021 tanggal 15 November 2021 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 19 November 2021;
  - 7) Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1709/PS.04/11/2021 tanggal 22 November 2021 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**, yang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 November 2021;
- Oleh karenanya indikator Persentase Pembinaan ke Daerah telah tercapai **100%** sesuai yang ditargetkan.

### Gambar 3

Foto Salah Satu Kegiatan Pembinaan di Tahun 2021





**Tabel 10.1**  
Capaian Persentase Pembinaan ke Daerah di Th. 2019 s/d 2021

No	Tahun	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	Pembinaan ke Satker Daerah	100%	100%	100%
2.	2020	Pembinaan ke Satker Daerah	100%	100%	100%
3.	2021	Pembinaan ke Satker Daerah	100%	100%	100%

#### 4. Peningkatan Kualitas Pengawasan

**Tabel 11**  
Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4					
Peningkatan Kualitas Pengawasan					
Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti		100%	100%	100%
b.	Persentase Pengawasan ke Daerah		100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%

##### a. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Untuk indikator kinerja Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti ini, pengukurannya didasarkan pada terlaksananya tindak lanjut pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Selama tahun 2021, tidak ada laporan pengaduan yang masuk atau diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana tergambar dalam laporan di bawah ini :


**Gambar 4**  
Laporan Tahunan Penanganan Pengaduan

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGERA SURABAYA  
Jalan Kotintang Madya VI No. 2 Surabaya  
Telp/Fax : (031) 8292138-8288622  
Kotak Pos : 211035 JKIP-Kode Pos : 60232  
SURABAYA

**LAPORAN TAHUNAN PENANGANAN PENGADUAN**  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGERA SURABAYA  
BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2021

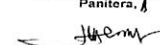
NO.	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.			NIHIL		

Mengetahui  
Panitera



Dr. ISTIWICAHYO, S.H., M.H.  
NIP.19571211198503 1 001.

Surabaya, 31 Desember 2021.  
Panitera,



Drs. SAMPIRIN HADI S., S.H., M.H.  
NIP.19611008 198503 1 006.

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa meskipun tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, namun bukan berarti kinerja tidak dilaksanakan. Pembuatan laporan Tahunan Penanganan Pengaduan diatas, merupakan bukti dilakukannya kinerja sebagai bentuk tindak lanjut dengan tidak adanya pengaduan yang masuk tersebut. Dengan demikian, capaian untuk indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti telah terpenuhi sebesar **100%**.

**Tabel 11.1**  
Capaian Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Th. 2019 s/d 2021

No	Tahun	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	2020	Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3.	2021	Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	NIHIL	100%

## b. Persentase Pengawasan ke Daerah

Untuk indikator Persentase Pengawasan ke Daerah, pengukuran capaiannya didasarkan pada terlaksananya kegiatan Pengawasan ke satker se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Untuk Tahun Anggaran 2021 ini, Pengawasan Kesekretariatan maupun Kepaniteraan oleh Hakim Pengawas Daerah telah dilaksanakan dengan baik tanpa mengabaikan protokol kesehatan selama Pandemi Covid-19 ini. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

### **Pengawasan Bidang Kepaniteraan :**

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1361/PS.04/9/2021 tanggal 13 September 2021 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 September 2021;
2. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1363/PS.04/9/2021 tanggal 13 September 2021 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 September 2021;
3. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1405/PS.04/9/2021 tanggal 17 September 2021 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 September 2021;
4. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1412/PS.04/9/2021 tanggal 17 September 2021 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 September s/d 1 Oktober 2021;
5. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1472/PS.04/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**, yang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 Oktober 2021;
6. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1575/PS.04/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021

telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**, yang dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 4 November 2021;

**Pengawasan Bidang Kesekretariatan :**

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1362/PS.04/9/2021 tanggal 13 September 2021 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 September 2021;
2. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1364/PS.04/9/2021 tanggal 13 September 2021 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 September 2021;
3. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1404/PS.04/9/2021 tanggal 17 September 2021 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 September s/d 1 Oktober 2021;
4. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1411/PS.04/9/2021 tanggal 17 September 2021 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 September s/d 1 Oktober 2021;
5. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1473/PS.04/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**, yang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 Oktober 2021;
6. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1576/PS.04/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**, yang dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 4 November 2021;

Dari uraian diatas, maka capaian untuk indikator Persentase Pengawasan ke Daerah telah terpenuhi sebesar **100%** sesuai yang ditargetkan.

**Gambar 5**  
Salah Satu Foto Kegiatan Pengawasan di Tahun 2021



**Tabel 11.2**  
Capaian Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Th. 2019 s/d 2021

No	Tahun	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	Pengawasan ke Daerah	100%	100%	100%
2.	2020	Pengawasan ke Daerah	100%	100%	100%
3.	2021	Pengawasan ke Daerah	100%	100%	100%

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersumber dari dana APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh 2 (dua) DIPA, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut :

### 1. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.01.2.548940/2021 TGL. 23 NOVEMBER 2020

Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 16.301.159.000,- (Enam belas milyar tiga ratus satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 15.953.185.348,- (Lima belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,87%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2021 mengalami *penurunan*. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 12**  
Realisasi Anggaran DIPA 01 Th. 2018 s/d 2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2019	12.522.397.000,-	12.447.236.137,-	99,40
2	2020	13.757.241.000,-	13.443.184.103,-	97,89
3	2021	16.301.159.000,-	15.953.185.348,-	97,87

### 2. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.05.2.548941/2021 TGL. 23 NOVEMBER 2020

Anggaran DIPA 05 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp. 297.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), sedangkan realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 249.610.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar 84,04%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2021 mengalami *peningkatan*. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 13**  
Realisasi Anggaran DIPA 05 Th. 2019 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2019	144.000.000,-	143.985.000,-	99,99
2	2020	250.441.000,-	210.128.808,-	83,90
3	2021	297.000.000,-	249.610.000,-	84,04

Dari realisasi kedua DIPA tersebut diatas merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 14**  
Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	297.000.000,-	249.610.000,-	84,04
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	297.000.000,-	249.610.000,-	84,04





## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya yang telah disusun ini, merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Laporan ini memberikan informasi Pencapaian Kinerja selama tahun 2021 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Hal ini diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk meningkatkan kinerjanya.

### B. SARAN

1. Diperlukan peningkatan kinerja yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta peningkatan pelayanan terhadap para pencari keadilan agar terpenuhi kepuasan para pencari keadilan serta kemudahan dalam menjangkau badan peradilan;
2. Sinergitas setiap unit dan bagian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam usaha meningkatkan kinerja dan pelayanan internal dan eksternal;
3. Optimalisasi penyusunan dan pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan tahun berikutnya;
4. Perlu adanya evaluasi dalam pengukuran untuk indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara dan indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.



## LAMPIRAN

1. SK Satgas SAKIP dan Tim Penyusun LKJIP
2. Reviu Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Strategis Tahun 2020-2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2020
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
6. Pengukuran Kinerja Per Triwulanan
7. Penghargaan



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
NOMOR : W3-TUN / 368 / PR.01 / 1 / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN SATGAS SAKIP DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 19 / SEK / SK / I / 2018 tertanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;
2. Bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tertanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Satgas SAKIP dan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Permen PAN & RB Nomor : PER / 9 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

8. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TENTANG PENETAPAN SATGAS SAKIP DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**
- Pertama : Membentuk kelompok kerja Satgas SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (sebagaimana daftar terlampir);
- Kedua : Adapun tugas dari Satgas SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang penyusunan SAKIP;
  2. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
  3. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP secara berkala pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
  4. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berjalan dengan baik;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal : 04 Januari 2022

Ketua

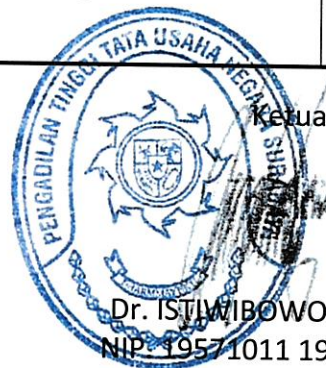


Dr. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.  
NIP. 19571011 198503 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi  
TUN Surabaya  
Nomor : W3-TUN/368/PR.01/1/2022  
Tanggal : 04 Januari 2022

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA SATGAS SAKIP DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	DALAM TIM
1.	Drs. SAMPIRIN HADI, SH.MH. NIP. 19611008 198503 1 006	Panitera Pembina Utama Madya (IV/d)	Ketua
2.	MARDIUS SEPTIADI, SH. NIP. 19720912 199203 1 001	Sekretaris Pembina Utama Muda (IV/c)	Wakil Ketua
3.	DONALD HAMONANGAN SINAGA, S.H. NIP. 19650710 199303 1 002	Panmud Hukum Penata Tk. I (III/d)	Anggota / Tim Sumber Data
4.	JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH. NIP. 19700130 199303 2 002	Panitera Pengganti Pembina (IV/a)	Anggota / Tim Sumber Data
5.	RINI SETIAWATI, S.E. NIP. 19750929 200604 2 002	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Pembina (IV/a)	Anggota / Tim Sumber Data
6.	OKI KAMESHWARA ISKANDAR, SH.MH. NIP. 19750422 200012 1 002	Kasubbag Tata Usaha & Rumah Tangga Pembina (IV/a)	Anggota / Tim Sumber Data
7.	SUBHAN JUFRI, S.H. NIP. 19760730 200003 1 001	Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran Penata Tk. I (III/d)	Anggota / Tim Penyusun
8.	ERMA RIZQI HANDAYANI, S.H. NIP. 19871115 201903 2 008	Analisis Perkara Peradilan Penata Muda (III/a)	Anggota / Tim Penyusun
9.	ACHMAD ADI APRILIYANTO	Pegawai Honorer	Anggota / Tim Penyusun



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<p><b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b></p>	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan</li> <li>• Sisa perkara = Sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama (untuk perkara Pemilihan Kepala Daerah), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat banding (untuk perkara selebihnya)</li> </ul>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>c. Persentase penurunan sisa perkara</p> <p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tn = sisa perkara tahun berjalan</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan tingkat banding yang dikirim tepat}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Putusan = Jumlah Perkara yang diputus dalam tingkat banding</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah Putusan yang dapat diakses dalam 1 hari}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Putusan Sengketa Pilkada</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
			Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan	

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

**VISI** : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung

- MISI** :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
  2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
  4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
  5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis			Rp.		
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target			
						Program	Jml	Sat								
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Pemberian Standar Pelayanan Minimal bagi Pencari Keadilan serta SDM Tenaga Teknis yang Mumpuni (Berkualitas)	1	KGT	237.779,000



No	Tujuan		Target		Sasaran		Target					Strategis			
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
													Jml	Sat	
				b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	250	Perkara	237.779.000
				c. Persentase Penurunan sisa perkara	80%	80%	80%	80%	80%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	250	Perkara	237.779.000
				d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - PK	80%	80%	80%	80%	80%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	250	Perkara	237.779.000

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
														Jml	Sat	
2.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	250	Perkara	237.779.000	
		Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus		b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	250	Perkara	237.779.000	

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
						Jml	Sat									
3.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase Pembinaan ke Daerah	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase Pembinaan ke Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen	1. Peningkatan Manajemen TUN 2. Pembinaan Adm. & Pengel. Keuangan BUA	1. Koordinasi Layanan Perkantoran	2	Layanan	100.200.000 13.711.436.000	
4.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase pengadilan yang ditindaklanjuti	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengadilan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen TUN	Koordinasi	1	Layanan	100.200.000	

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
						2020	2021	2022	2023	2024				Jml	Sat	
		Persentase Pengawasan ke daerah		b. Persentase Pengawasan ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Pengawasan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen	1. Peningkatan Manajemen TUN 2. Pembinaan Adm. & Pengel. Keuangan BUA	1. Koordinasi Layanan Perkantoran	2	Layanan	100.200.000 13.711.436.000	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	80%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase Pembinaan ke daerah	100%
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase Pengawasan ke daerah	100%

**PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	80%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase Pembinaan ke daerah	100%
4.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase Pengawasan ke daerah	100%

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target (%)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang di selesaikan	100	80	84	105	60	52	86,66	55	55	100	70	74	105,71
	b. Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu	100	80	84	105	60	52	86,66	55	55	100	70	74	105,71
	c. Persentase penurunan sisa perkara	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	91,66
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi • PK	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	101	67,33
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang di kirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	80	84	105	60	52	86,66	55	55	100	70	74	105,71
	b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses dalam 1 hari setelah perkara putus	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100



## Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Nomor : TAPM. 13-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2019

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Alamat : Jl. Ketintang Madya VI No. 2  
Surabaya - Jawa Timur 60232

Terakreditasi : **"A" (Excellent)**

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini diberikan setelah dilaksanakan Akreditasi dari tanggal 2 sampai dengan 3 Mei 2019 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 September 2019.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan  
Peradilan Tata Usaha Negara

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.



# CERTIFICATE

Management System as per  
ISO 9001 : 2015

In accordance with TUV NORD Indonesia procedures, it is hereby certified that

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**  
Jl. Ketintang Madya VI No. 2, Karah,  
Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60232  
Indonesia



applies a management system in line with the above standard for the following scope

**Administration of Justice and Other Services in Court**

Certificate Registration No. 16 00 E 17077  
Audit Report No I-E17077/2017

Valid until 2020-05-28  
Initial Certification 2017-05-29

TUV NORD Indonesia Certification Body  
TUV NORD Group

Jakarta, 2017-05-29

This certification was conducted in accordance with the TUV NORD Indonesia auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

PT TUV NORD Indonesia, Perkantoran Hijau Arkadia Tower F.7<sup>th</sup> floor, Jl. Let. Jend. T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520



TUV NORD Group

147369

ID 17034 CA

